

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rusia sejak awal kemunculannya sebagai bagian dari Uni Soviet telah begitu sukses menjadi pusat perhatian Internasional - dengan ideologi *marxisme-leninisme* yang begitu kontra terhadap demokrasi, ideologi yang juga sedang disemaikan oleh negara-negara Barat. Segala tindakan perkonomian dan aspek kehidupan dilakukan dengan dikontrol secara terpusat di bawah kendali Moskow sebagai pusat pemerintahan Uni Soviet saat itu. Ideologi *Marxisme-Leninisme* dijadikan sebagai sebuah inspirasi bagi para pelaksana organisasi politik di Uni Soviet. Hal tersebut juga merupakan bahasa politik antara segala penjuror masyarakat dan pemerintah dalam melegitimasi struktur sistem politik di mata masyarakatnya agar menjunjung tinggi ideologi yang dimaksud.<sup>1</sup> Selain itu, segala bentuk tindakan pemberitaan melalui media dan aspirasi pendapat pun harus di kontrol oleh pemerintah.

Kemunculan Mikhail S. Gorbachev sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) pada Maret 1985 membawa angin segar pada kehidupan politik dan ekonomi di Uni Soviet itu sendiri. Pada awal pemerintahannya, Gorbachev mulai menunjukkan perkembangan pesatnya secara perlahan. Gorbachev aktif memperbaiki kemacetan sirkulasi ekonomi dan

---

<sup>1</sup> Goldman, Minton F. *The soviet union and eastern Europe*. (Connecticut : Dushkin publishing group, 1990) Hlm. 6-7

stagnansi politik Uni Soviet di bawah pemerintahan sebelumnya melalui *Glasnost* (keterbukaan), *Perestroika* (restrukturisasi), dan *Demokratizatsiya* (demokratisasi). Melalui perestroika, Gorbachev mulai merestrukturisasi sistem Uni Soviet dengan meliberalisasi struktur partainya. Usaha-usaha radikal tersebut pada akhirnya memberikan peluang bagi masyarakat Rusia untuk berorganisasi dan mengaspirasiakan pendapatnya. Masyarakat Uni Soviet mulai secara terang-terang menyatakan perasaan anti-Soviet mereka yang diawali oleh Kazakhstan pada tahun 1986 dan dilanjutkan oleh kaum nasionalis yang ingin melepaskan diri dari kesatuan Soviet. Pada akhirnya nasionalisme pada tiap-tiap negara memudar dan berujung pada kendurnya integrasi di wilayah periferi.

Kemunduran politik Uni Soviet pasca kepemimpinan Mikhail Gorbachev di penghujung abad 20 telah menyisakan negara Rusia menjadi satu-satunya pewaris tunggal di wilayah eks-Uni Soviet tersebut. Rusia dengan wilayahnya yang luas, militer yang kuat, serta sumber daya alam yang berkecukupan seolah menjadi bukti atas sisa-sisa kekuatan Uni Soviet di era perang dingin. Di sisi lain, Rusia dengan trauma keruntuhan Uni Soviet dan *post-power syndrome*-nya selalu ingin tampil sebagai sosok yang lebih besar, baik dalam hal ekonomi, politik, dan keamanan. Tentu saja ini memberikan dampak yang besar pada dinamika perubahan kebijakan luar negeri Rusia dari masa ke masa.

Rusia pada hakikatnya merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan. Hal ini dibuktikan dengan Politik Rusia yang mendukung usaha-

usaha atas tercapainya kedaulatan sebuah wilayah sejak Uni Soviet Runtuh. Rusia juga memberikan kedaulatan yang besar secara otonom kepada wilayah yang bergabung dalam Federasi Rusia. Selain itu, kemerdekaan di beberapa wilayah Asia tengah dan Kaukasus secara mayoritas lebih kurangnya dapat dikatakan terwujud atas usaha dan dukungan yang diberikan oleh Rusia. Sejalan dengan itu, secara politik Rusia juga menjadi negara yang aktif dalam menangani konflik-konflik separatisme di berbagai negara.

Rusia seiring dengan pertumbuhannya berusaha menjadi lebih aktif di dalam institusi internasional sebagai bagian dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Kevokalan Rusia yang pertama kali dirasakan paling mencolok adalah saat terjadi *Military Intervention* oleh NATO di wilayah Balkan, Serbia, pada akhir tahun 1999. Wilayah Balkan seketika menjadi pusat ketegangan antara Rusia dan Barat. Kala itu Rusia dengan lantang menyatakan rasa keberatan terhadap tindakan NATO melalui *UN Security Council (UNSC)*, *Euro-Atlantic Cooperation Council (EACC)*, dan *NATO-Russia Joint Permanent Council (JPC)* yang diatur di bawah *NATO-Russia Founding Act* tahun 1997. Penolakan yang dilontarkan Rusia tersebut adalah berdalih pada kesewang-wenangan NATO yang mengabaikan DK PBB-secara tidak langsung mengabaikan Rusia-dalam melancarkan serangannya ke wilayah Balkan. Sayangnya tindakan yang dilakukan Rusia tersebut ternyata masih belum cukup kuat untuk menghalangi intervensi NATO di wilayah Kosovo dan sekaligus

menjadi cobaan berat bagi diplomasi Rusia yang justru berakhir pada kembali dinginnya hubungan Rusia-Barat.<sup>2</sup>

Kosovo sendiri merupakan wilayah yang terletak di sebelah tenggara Eropa, didominasi oleh 92% etnis muslim Albania dan 8% etnis Serbia, Gorani, Turki, Ashkali, dan Mesir. Negara ini selama lebih dari berabad-abad menjadi bagian dari sejarah Serbia. Berakhirnya Perang Dunia II menjadikan Kosovo sebagai provinsi otonom bagian Serbia di bawah Republik Federal Sosialis Yugoslavia.<sup>3</sup> Konflik di wilayah ini muncul pasca wafatnya Tito, yang berlanjut dengan perpecahan Yugoslavia. Sejak saat itu, gerakan-gerakan separatis dari etnis Albania terus berkejolak dan bereskalasi pada Perang Kosovo. Perang Kosovo tersebut merupakan perlawanan pasukan Republik Federal Sosialis Yugoslavia terhadap kelompok perlawanan Kosovo, Kosovo Liberation Army (KLA), yang dibantu oleh NATO serta tentara Albania.<sup>4</sup> Perang tersebut dilatarbelakangi oleh referendum rakyat Kosovo yang menginginkan kemerdekaan dari Serbia. Kejadian itu memicu respon yang keras dari pemerintah yang menganggap bahwa tindakan itu adalah ilegal.

Melalui resolusi 1244 yang dikeluarkan PBB tahun 1999, PBB mendasarkan dirinya untuk memerintah di Kosovo dengan membentuk KFOR (*Kosovo Force*) sebagai pasukan keamanan yang di komandoi oleh NATO.

---

<sup>2</sup> Smith, Mark A, dkk. *Kosovo: Russia's Response*. (England, The Conflict Studies Research Centre)

<sup>3</sup> *CIA Factbook : Kosovo*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>, pada 15 Sept. 2014, 20.05 WIB

<sup>4</sup> Lambeth, Benjamin S. *NATO's Air War for Kosovo A Strategic and Operational Assessment*, (Santa Monica: RAND, 2001) Hlm. 53

Selama beberapa tahun, PBB dan beberapa negara yang tergabung sebagai *Contact Group* mengusahakan perdamaian di antara kedua kubu, namun gagal. PBB kemudian menunjuk Martti Ahtisaari untuk merumuskan keputusan-keputusan yang dapat menyelesaikan konflik etnis di Serbia yang kemudian disebut sebagai *Ahtisaari Plan*.

Setelah mengalami krisis menahun dan perjalanan yang cukup terjal, Kosovo melalui *The 2008 Kosovo's Unilateral Declaration Of Independence*<sup>5</sup> mulai memasuki episode terakhir atas perjuangannya dalam menentukan nasib sendiri. Deklarasi tersebut mengakhiri krisis etnis antara etnis Muslim mayoritas, Albania, dengan etnis Serbia sebagai kaum minoritas di wilayah Kosovo. Dukungan pun datang terutama dari Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Uni Eropa. Pada 18 Februari 2008, Amerika Serikat bersama dengan kebanyakan negara Uni Eropa yang menyusul kemudian, secara formal mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Amerika Serikat bahkan merespon permintaan Kosovo untuk melangsungkan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dan berkomitmen menjadi partner terdekat Kosovo dalam berpolitik. Selain itu, Amerika pun menawarkan kerjasama yang serupa terhadap Serbia serta menjanjikan proteksi dan sekuritas etnis Serbia di Kosovo.<sup>6</sup> Meskipun demikian, hal ini tidak segera mengentaskan permasalahan internal di Kosovo dengan mudah. Deklarasi tersebut justru dinilai telah melukai

---

<sup>5</sup> *Convened in an extraordinary meeting on February 17, 2008, in Pristina, the capital of Kosovo*, alinea pertama dari *Cosovo Declaration of Independence*. Diakses melalui [http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Dek\\_Pav\\_e.pdf](http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Dek_Pav_e.pdf), pada 13 Sept. 2014, 23.16 WIB.

<sup>6</sup> *U.S. Recognizes Kosovo as Independent State* diakses melalui <http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm>, pada 12 Okt. 2014, 04.33 WIB

kedaulatan Serbia, Piagam PBB, UNSCR 1244, *The principles of the Helsinki Final Act*, *Kosovo's Constitutional Framework* dan *The High-Level Contact Group accords*.<sup>7</sup>

Rusia bersama Tiongkok, enam negara Uni Eropa, serta beberapa negara yang mendukung Serbia pun menolak Kosovo sebagai negara yang berdaulat. Presiden Rusia Dmitry Medvedev, melanjutkan tindakan Putin, pada masa pemerintahannya terus mendukung penolakan Serbia atas kemerdekaan Kosovo hingga akhir. Selanjutnya, saat menjabat sebagai presiden yang kedua kalinya, Presiden Rusia, Vladimir Putin menegaskan kembali dukungannya terkait sikap Serbia yang menolak kemerdekaan Kosovo. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia terdahulu, Sergei Lavrov, dan Duta Besar Vitaly Churkin juga aktif mempromosikan oposisi Rusia terhadap rencana Ahtisaari untuk memerdekakan Kosovo. Tidak hanya itu, penentangan atas kemerdekaan Kosovo pun didukung oleh Dinas keamanan yang sekarang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di Kremlin.<sup>8</sup> Pada tahun 2010, Menteri Hubungan Luar Negeri Rusia kembali menyerukan oposisinya terhadap kemerdekaan dengan menyatakan bahwa Rusia mendukung kedaulatan serta integrasi wilayah di Serbia.<sup>9</sup> Rusia bahkan menyatakan diri bahwa negara tersebut akan terus berada dibelakang Serbia dan ikut mendukung segala kebijakan maupun respon yang dilakukan oleh Serbia.

---

<sup>7</sup> *Statement by Russia's Ministry of Foreign Affairs on Kosovo*, diakses melalui [http://www.mid.ru/brp\\_4.nsf/sps/041C5AF46913D38AC32573F30027B380](http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/041C5AF46913D38AC32573F30027B380), pada 16 Sept. 2014, 15.29 WIB

<sup>8</sup> Antonenko, Oksana. *Russia and the Deadlock Over Kosovo*. (Rusia: NIS Center, 2007) Hlm.16

<sup>9</sup> *Statement by Russia's Ministry of Foreign Affairs on Kosovo*, diakses melalui [http://www.mid.ru/BDOMP/Brp\\_4.nsf/arh/BB6A8618C941E0AEC325772900478363?OpenD](http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/BB6A8618C941E0AEC325772900478363?OpenD) pada 15 Sept. 2014, 18.29 WIB

Bila dilihat melalui kaca mata politik, sepiintas dukungan Rusia terhadap Serbia atas penolakan deklarasi Kosovo tidak hanya terbatas pada kekhawatiran atas adanya pelanggaran hukum Internasional. Rusia sebagai warisan Uni Soviet pada hakikatnya adalah negara yang mendukung kedaulatan atas entitas etnis yang memang mengusahakan dan menginginkannya. Penolakan Rusia terhadap kemerdekaan Kosovo merupakan bentuk keberanian sekaligus cara Rusia dalam mengindikasikan adanya keinginan-keinginan besarnya sebagai sebuah negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penulisan ini dapat dirumuskan menjadi: “Mengapa Rusia Menolak Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Kosovo atas Serbia Tahun 2008?”

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan dan menggambarkan sejarah Rusia dan hubungan-hubungan kerjasamanya terhadap negara-negara Balkan, terutama Serbia.
2. Mengelaborasi serta memaparkan secara deskriptif latar belakang konflik di Kosovo yang melibatkan kelompok separatis maupun pihak asing, dinamika konflik, upaya-upaya kelompok separatis maupun pihak asing dalam mewujudkan kemerdekaan Kosovo atas Serbia, serta sikap Rusia selama Konflik berlangsung

3. Mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi Rusia dalam menolak deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia tahun 2008.

## **D. Landasan Teori/Konsep**

### **1. Teori Geopolitik**

Pada titik ini, Teori ini akan digunakan untuk menganalisa Kepentingan Rusia dalam merespon deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008. Selain itu, Teori ini juga akan menjelaskan lebih dalam mengenai hal-hal yang melatarbelakangi Rusia dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama pasca kemerdekaan Kosovo.

Lacoste dalam bukunya *Dictionnaire de Géopolitique* menjelaskan bahwa Istilah 'geopolitik' pertama kali dikenalkan oleh Pengacara konstitusional Swedia, Rudolf Kjellen, dan secara sistematis dikembangkan oleh Karl Haushofer selama periode intensifikasi Eropa.<sup>10</sup> Memahami sejarah dan konteks penggunaan dari geopolitik sendiri merupakan cara yang terbaik dalam memahami makna dari geopolitik. Kjellen dan beberapa cendekiawan yang lain mendefinisikan geopolitik sebagai suatu pengetahuan yang memiliki hubungan langsung dengan fisik bumi dan kehidupan politik di dalamnya.<sup>11</sup> Mengacu pada pengertian harfiah dari kata “*geopolitics*”, dijelaskan dalam *Encyclopedia Britannica* bahwa

---

<sup>10</sup> Benno Teschke *Historical Materialism*, Hlm. 330

<http://dcm.inkrit.org/wp-content/data/hkwm-geopolitics.pdf>

<sup>11</sup> Ó Thuatail, Gearóid., dkk. *The Geopolitics Reader*. (New York: Routledge, 1998) Hlm. 1



geopolitik merupakan suatu analisis atas pengaruh geografis pada kekuatan hubungan di dalam hubungan internasional<sup>12</sup>

Salah satu hal yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara adalah lokasi dan wilayah fisiknya. Kegley menjelaskan bahwa geopolitik merupakan salah satu aspek dari lingkungan global yang mungkin mempengaruhi kebijakan luar negeri. Tindakan-tindakan politis dan kebijakan suatu negara biasanya akan terbentuk atas berapa banyak tetangga dalam ruang lingkup batas negaranya, atau seberapa besar alam menyediakan proteksi yang baik dari segala invasi pihak asing seperti pegunungan dan lautan.<sup>13</sup>

Geopolitik merupakan teori yang tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan (*pseudoscience*) yang menjadikan faktor geografi sebagai hal mutlak yang mestinya menentukan kekuatan, dan selanjutnya nasib suatu negara.<sup>14</sup> Sir Halford Mackinder dengan teori "*Heartland*" menyatakan "*Who rules East Europe, command the Heartland; Who rules the Heartland, command the World Islands; Who rules the World islands, command the World.*"<sup>15</sup> Ditambahkan Morgenthau,<sup>16</sup> bahwa berdasarkan analisis tersebut, Mackinder meramalkan munculnya Rusia, atau negara apa pun yang mengendalikan wilayah Eropa Timur sebagai kekuatan dunia yang berpengaruh.

---

<sup>12</sup> *Geopolitics*. "Encyclopædia Britannica Online". Diakses melalui <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229932/geopolitics>, pada 13 Oktober 2014, 12.30 WIB

<sup>13</sup> Kegley, Charles W. dkk. *World Politics*. (New York: Worth Publishers, Inc, 1999) Hlm 47-48

<sup>14</sup> Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa*. Revisi Kenneth W. Thompson; Penerjemah, S. Maimoen, (el.) – Ed. 1 Cet.1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 190

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dari sekian nama-nama cendekiawan geografi politik, Friedrich Ratzel dengan bukunya *Politische Geographie* dan *The Laws on the spatial Growth of States* mengongkretkan dasar dari konsep geopolitik yang akan di bahas. Ratzel mengembangkan teori organisme negara. Teori ini merupakan teori yang menyamakan antara organisme biologis dengan sebuah negara yang hidup sesuai dengan hukum biologi. Ratzel melihat bahwa geografi akan membantu manusia dalam memahami ilmu pengetahuan sosial dan kehidupannya. Menurut Ratzel, setiap negara merupakan organisme yang hidup. Organisme negara yang sedang tumbuh biasanya cenderung menyerap organisme lain yang lebih lemah. Beliau kemudian mengukur pertumbuhan negara dari ekspansinya yang berdampak pada bertambahnya kekuatan sebuah negara. Ratzel pun meyakini bahwa geografi sebuah negara diperhitungkan sebagai hal yang penting dalam menentukan aktivitas masyarakat di dalamnya. Konsep lain yang diturunkan oleh Ratzel adalah konsep *lebensraum* (Ruang Hidup).<sup>17</sup> Konsep tersebut merupakan konsep yang menjelaskan mengenai perlunya ruang hidup yang lebih luas, berbanding lurus dengan pertumbuhan sebuah organisme yang sedang hidup. Ruang hidup merupakan sesuatu yang alamiah. Jadi saat sebuah organisme-dalam hal ini negara- melakukan sebuah ekspansionisme, adalah sesuatu yang bisa dimengerti secara geopolitis.

Flint dalam buku *Introduction to Geopolitics* menjelaskan bahwa geopolitik dapat didefinisikan sebagai sebuah kata yang memunculkan gambaran. Kata tersebut memancing ide atas perang, kerajaan, dan diplomasi: bahwa

---

<sup>17</sup> Hagan, Charles B. "Geopolitics" *The Journal of Politics* Vol. 4, No. 4, 1942. Hlm. 478-490.

geopolitik merupakan ilmu terapan atas kontrol sebuah negara dan kompetisi atas teritori. Namun dalam sifat kontemporer, definisi tersebut tidak lagi terlalu relevan terhadap konteks tingkah laku negara pada jaman modern. Untuk menjelaskan geopolitik dalam tatanan dunia yang lebih modern, menurut Gilmartin dan Kofman, pertama, kita harus mencatat hubungan antara geopolitik dan kenegarawanan.<sup>18</sup> Kedua, mengartikan geopolitik jangan dalam arti sempit saja. Geopolitik merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kompetisi atas wilayah. Geopolitik merupakan cara sebuah negara dalam memandang dunia.<sup>19</sup> Geopolitik saat ini dapat juga dipahami sebagai konflik ras, pelarangan pergerakan kelompok, bahkan diplomasi sebuah negara atas emisi gas dan efek rumah kaca. Dalam kata lain, geopolitik mengidentifikasi sumber-sumber, terapan, dan perwakilan yang mendukung kontrol wilayah dan penggunaan sumber daya alam. Hasilnya, pengetahuan geopolitik dapat dilihat sebagai bagian dari usaha untuk memarjinalisasi masyarakat guna menahan dominasi atas pandangan kelompok-kelompok yang lebih kuat.<sup>20</sup>

Dalam era dunia yang kekinian, berakhirnya perang dingin merupakan tetesan hujan bagi munculnya pemahaman baru bagi studi geopolitik. Geopolitik dalam tatanan dunia yang baru tidak lagi dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh cendekiawan tempo dulu. Geopolitik telah masuk ke dalam era “*New Order Geopolitics*”, era di mana geopolitik justru lebih didominasi oleh pertanyaan seputar geo-ekonomi. Selain itu, geopolitik juga diwarnai dengan isu-isu seputar

---

<sup>18</sup> Seperti yang dikutip oleh Fint dalam *Introduction to Geopolitics* (Oxon: Routledge, 2006) Hlm.12

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 14

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 16

globalisasi ekonomi, perdagangan, investasi, komoditas, serta citra yang membentuk sebuah negara seperti struktur geografi sebuah negara dan kedaulatan di dalamnya. Bagi beberapa cendekiawan, “*New Geopolitics*” atau geopolitik yang baru lebih mendeskripsikan ketiadaan dominasi agresif atas keinginan sebuah negara untuk menguasai blok wilayah, namun lebih kepada usaha sebuah negara memunculkan masalah-masalah transnasional seperti terorisme, proliferasi nuklir, konflik anatar masyarakat, dan sejenisnya ke permukaan. Hubungan antara politik dan geografi dalam tatanan dunia baru dinilai sama-bahkan lebih-pentingnya dibanding dengan hubungan negara dan masyarakatnya dalam menangani masalah lingkungan.<sup>21</sup>

Berbicara tentang geopolitik Rusia, saat negara-negara di dunia yang pernah menganut komunis kembali pada identitas nasionalnya yang terdahulu, justru Rusia mengalami krisis identitas negaranya pasca keruntuhan Uni Soviet.<sup>22</sup> Keruntuhan Uni Soviet membuat Rusia menjadi sebuah negara yang kehilangan tidak hanya pada wilayah, tetapi segala kekuatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun lamanya. Rusia merupakan negara yang besar secara geografis dengan penduduk yang juga tidak sedikit. Sayangnya, Rusia tidak memiliki banyak perbatasan maupun *buffer zone* yang dapat melindunginya dari serangan musuh yang datang dari luar. Hal ini yang kemudian membuat Rusia menjadi begitu ekspansif dalam memenuhi kepentingannya. Berlandaskan pada pemahaman tersebut, sifat ekspansionisme Rusia tidak lagi ditunjukkan secara

---

<sup>21</sup> *Op. Cit.*, Gearóid. Hlm. 2

<sup>22</sup> O’Loughlin, John. Dkk. *Eurasian Geography and Economics* (V. H. Winston & Son, Inc, 2005) Hlm. 23

eksplisit dan menggunakan *hard power* layaknya pada periode Tsarisme maupun masa Perang Dingin, namun lebih ditunjukkan melalui cara-cara yang lebih diplomatis serta melalui penciptaan dan penyebaran pengaruh dengan menyesuaikan konteks kehidupan politik internasional saat ini.

Rusia saat ini secara jelas menampakkan bahwa kepentingan kebijakan luar negerinya dipengaruhi secara geopolitik yang kekinian. Namun pada kenyataannya, O’Luoghlin dan Talbott menyatakan bahwa geopolitik di Rusia saat ini tidak jauh berbeda dengan geopolitik pada masa Uni Soviet terdahulu. Dalam hal ini, geopolitik Rusia kebanyakan terfokus pada negara-negara *Near Abroad* (negara-negara eks-Uni soviet) dan Wilayah Tenggara Eropa (baca: Balkan). Bagi Rusia, negara-negara *Near Abroad* dan Balkan tidak serta merta merupakan wilayah strategis, tetapi juga merupakan wilayah yang dekat dengan Rusia dalam konteks sejarah, ekonomi, maupun budayanya sehingga menjadi mudah bagi Rusia untuk merusifikasi wilayah-wilayah tersebut ke dalam satu identitas.<sup>23</sup> Aron juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Rusia di wilayah Eropa timur dan Balkan mengakar pada kepentingan geopolitik imperatif Rusia. Artinya, Rusia masih menyisakan sebuah kekuatan yang sangat besar di segala segi aktivitas Internasional, serta hegemon baik di bidang politik, militer, maupun ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 24-29

<sup>24</sup> Aron, L., *The Putin Doctrine*, diakses melalui <http://www.foreignaffairs.com/articles/139049/leon-aron/the-putin-doctrine> pada 12 Oktober 2014, 00.56 WIB

Berhubungan dengan itu, mengacu pada teori Mackinder, Ratzel dan New *Geopolitics*, Rusia pada masa federasi berusaha meluaskan jangkauan hubungan ekonominya di wilayah Eropa Timur dan Balkan (wilayah di sebelah tenggara Eropa yang merentang dari Slovenia hingga Yunani). Wilayah Balkan yang menjadi fokus jangkauan Rusia adalah Serbia, Bulgaria, Slovenia, Hongaria, Yunani, Bosnia-Herzegovina dan wilayah di sekitarnya. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling strategis bagi Rusia. Strategis yang dimaksud adalah keuntungan-keuntungan yang tidak hanya pada infrastrukturnya, tetapi juga transportasi yang mampu mendukung pasar gas dan minyak Rusia ke negara-negara Eropa melalui wilayah tersebut. Terbukti pada Desember 2012, pasar gas Rusia menembus pasar wilayah Balkan, Austria, dan Italia, dengan menyalurkan 63 milyar meter kubik gas pertahunnya.<sup>25</sup> Selain energi, pendekatan geopolitis Rusia di wilayah Balkan dibuktikan dengan banyaknya investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) kepada negara-negara tersebut.

Serbia merupakan salah satu contoh wilayah tujuan atas Investasi Asing Langsung yang diberikan oleh Rusia. Pengaruh Rusia di Serbia bahkan menjadi semakin kuat, mengacu pada banyaknya perjanjian pinjaman, bantuan finansial, maupun proyek infrastruktur.<sup>26</sup> Rusia dan Serbia sendiri telah menyetujui keputusan bilateral guna memperbaiki perekonomian di kedua negara, bahkan Serbia merupakan negara satu-satunya yang menjalani hubungan perdagangan bebas dengan tanpa bea dan bebas produksi antar wilayah. Terlepas dari ekonomi, pengaruh politik Rusia di Serbia pun cukup dapat diperhitungkan. Politisi elit

---

<sup>25</sup> <http://www.south-stream.info/route/> diakses pada 15 Okt. 2014, 16.15 WIB

<sup>26</sup> *Op. Cit.*, Petrillo., Hlm. 6

Rusia dan Serbia masih sangat sering berbincang mengenai Slavis dan Persaudaraan Ortodoks yang pada akhirnya memperkuat hubungan di kedua negara.<sup>27</sup>

Kebijakan Rusia terhadap Serbia-termasuk pada dampak atas oposisinya terhadap kemerdekaan Kosovo-diawali secara historis bersama dengan Serbia sejak abad ke-19; saat tingginya tuntutan dari kesatuan wilayah di Balkan untuk memerdekakan diri dari *steer* kekuasaan kerajaan Ottoman, yang dimeriahkan dengan bantuan oleh Rusia pada perang Rusia-Turki tahun 1877-1878.<sup>28</sup> Kemudian dilatarbelakangi oleh *Russia's Western Balkan Policy*, yaitu kebijakan Rusia dalam mencoba untuk menampilkan diri sebagai mitra ekonomi dan politik yang kredibel dan menjanjikan bagi negara-negara Balkan,<sup>29</sup> Rusia berusaha memutakhirkan hubungan dan mulai aktif untuk terus merujuk Serbia dalam menghadapi dan mengentaskan permasalahan ekonomi maupun politik satu sama lain, yang dalam hal ini, sebagai contoh adalah konflik Kosovo sebagai perhatian masyarakat dunia beberapa waktu lalu.

Konflik yang terjadi di Kosovo hingga berujung pada kemerdekaannya secara geopolitis merupakan salah satu strategi yang diambil oleh Rusia dengan memunculkan konflik etnis kepermukaan sebagai salah satu upaya geopolitisnya di wilayah Balkan. Guna mendominasi masyarakat Slavik dan menyatukannya,

---

<sup>27</sup> Malek, Martin. *The Russian "Return" to the Western Balkans* dalam Felberbaur, Ernst M. Dkk. *Cutting or Tightening the Gordian Knot? the of Future Kosovo and the Peace Process in the Western Balkans After the Decisions on Independence*. (Vienna Study Group Information : Study Group Information of National Defence Academy, 2008) Hlm. 143

<sup>28</sup> Lerup, Madeleine. *Russia and the Kosovar declaration of Independence*, 2013, Lund University, Sweden. Hlm. 10

<sup>29</sup> Enza Roberta Petrillo. *Russian Foreign Policy Towards The Balkans: Which Perspective?* (University L'Oriental, 2013) Hlm. 1

Rusia harus menjadi pemeran utama di wilayah Balkan. Guna mendapatkan gelar tersebut, adalah menjadi lebih mudah bagi Rusia untuk mendukung Serbia dengan dominasi masyarakat Slavik dan ikatan historis yang kuat ketimbang mendukung Kosovo yang mayoritasnya adalah etnis Albania.

Segala upaya politik yang dilakukan Rusia di Serbia telah menjadikannya sebagai sahabat terdekat Serbia dalam berbagai aspek, *et vice versa*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rusia kemudian menyatakan diri untuk berkomitmen mendukung segala keputusan Serbia untuk menolak usaha kemerdekaan Kosovo atas Serbia.

## **2. Konsep *Sphere of Influence* (Lingkup Pengaruh)**

Konsep *Sphere of Influence* merupakan konsep yang cukup banyak dibicarakan oleh kebanyakan ilmuwan hubungan internasional, khususnya sejak era perang dingin. Pada kenyataannya, *Sphere of Influence* sendiri merupakan konsep yang masih belum secara gamblang ter jelaskan dalam kebanyakan literatur maupun penelitian. Meskipun demikian, ada beberapa ahli yang sudah berusaha untuk menjelaskan secara teoritis atas makna sebenarnya dari konsep lingkup pengaruh tersebut.

Dalam encyclopedia Britannica dijelaskan arti sempit dari konsep lingkup pengaruh sebagai :

*“Sphere of Influence, in international politics, the claim by a state to exclusive or predominant control over a foreign area or territory. The term may refer to a political claim to exclusive control, which other nations may or may not recognize as a matter of fact, or it may refer to a legal*



*agreement by which another state or states pledge themselves to refrain from interference within the Sphere of Influence.*”<sup>30</sup>

Hast dalam buku *Sphere of Influence in International Relations: History, Theory and Politics*, menjelaskan bahwa: “... di mana saat sebuah negara mengejar “*Sphere of Influence*”, hal tersebut menyiratkan imperialisme, penindasan, dan tekanan (militer, ekonomi, dan politik)...<sup>31</sup> “.... Persaingan antara negara-negara adikuasa... mengesampingkan kekuatan dan batasan-batasan atas kemerdekaan serta kedaulatan terhadap negara yang dipengaruhi. “<sup>32</sup>

Selain itu, masih dalam literatur yang sama, dijelaskan oleh Kaufman bahwa : ”*Sphere of Influence* merupakan wilayah geografis yang dicirikan dengan tingginya penetrasi oleh satu negara adikuasa dengan mengesampingkan kekuatan yang lain dan terutama saingan dari negara adikuasa itu sendiri”.<sup>33</sup> *Sphere of Influence* merupakan konsep yang dipakai setelah adanya kesepakatan-kesepakatan antara negara-negara yang dominan dan negara-negara yang lebih kecil melalui dibentuknya perjanjian-perjanjian. Dengan demikian, kekuatan dominan dapat melakukan kewengannya di lingkup pengaruhnya tanpa merugikan kedaulatan masing-masing negara. Meskipun pengertian yang dijelaskan di atas sudah tidak terlalu relevan dengan realita kehidupan bernegara saat ini, namun pengertian tersebut masih tetap digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>30</sup> *Sphere of Influence* dalam Encyclopedia Britannica, diakses melalui: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287778/sphere-of-influence>, pada 17 Okt.2014, 19.27 WIB

<sup>31</sup> Hast, Susanna. *Sphere of Influence in International Relations: History, Theory, and Politics* (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2014) Hlm. 5

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 6

<sup>33</sup> *Ibid.*

kepentingan lembaga eksekutif di negara yang kuat terhadap negara-negara yang sedang berkembang.<sup>34</sup>

Keruntuhan Uni Soviet pada abad ke-20 merupakan sebuah katastrofe politik yang sangat parah dalam sejarah Rusia. Untuk pertama kalinya masyarakat Rusia harus terpecah belah menjadi berpuluh-puluh bagian. Tidak hanya bagi Rusia, tetapi kejadian tersebut juga menjadi babak baru bagi dunia, di mana Amerika Serikat kemudian muncul sebagai negara yang mendominasi zona hubungan internasional. Kala itu Rusia yang sedang menyembuhkan diri harus merasakan kenyataan pahit; Eksistensi Rusia dikesampingan oleh dunia.

Sejak awal era milenium, Putin memiliki ambisi yang besar untuk mengembalikan identitas nasional Rusia dan menjadikan Rusia sebagai kekuatan baru bagi dunia. Menengok kebijakan luar negeri Putin pada tahun 2000-2008: adalah mengedepankan kepentingan Rusia sebagai negara besar dan memiliki pengaruh yang besar dalam kancah internasional dengan terjaganya keamanan wilayah melalui peningkatan pertahanan negara, kedaulatan, dan kesatuan negara, serta memiliki posisi dalam hubungan internasional guna mendukung perkembangan dalam negerinya.

Sebagaimana yang ditulis oleh Petrillo dalam literatur politik luar negeri Rusia,<sup>35</sup> bahwa wilayah Balkan dan *Near Abroad* merupakan kawasan andalan untuk dijadikan proyeksi pengaruh bagi Rusia. Dalam konteks Rusia, ambisi Rusia saat ini adalah menjadi salah satu kekuatan dunia, atau paling tidak sebagai

---

<sup>34</sup> *Protectorates and Sphere of Influence*. Diakses melalui:

<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3402300125.html>, pada 18 Mar. 2015, 11.25 WIB

<sup>35</sup> Petrillo, Enza Roberta. *Russian foreign policy towards the Balkans: which perspective?*. (ISPI Journal, 2013) hlm.2

pemain yang paling dipertimbangkan dalam sistem global di abad ke-21 ini.<sup>36</sup> Pengaruh Rusia terhadap dunia di bawah Valdimir Putin pasca tahun 2000-an telah mengalami kemajuan pesat dibanding Rusia di bawah Boris Yeltsin pada masa-masa sebelum dan sesudah perang Balkan di akhir abad ke-20.

Jika kita melihat konteks di wilayah Balkan, maka kita akan menemui dua pendekatan yang cukup kontras. Pertama adalah pendekatan Barat yang multilateral, yaitu pendekatan dengan menggunakan instrumen multi-dimensional dan instrumen multi-tujuan. Instrumen-instrumen tersebut dijabarkan sebagai kebijakan kedaulatan bersama, *win-win cooperation*, dan kepentingan mutual. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan Rusia yang multipolar, di mana Rusia terus menjunjung tinggi konsep retro yang menjabarkan benturan kepentingan nasional dan menekankan pada prioritas kebijakan Rusia itu sendiri.

Menilik konflik Kosovo, sesungguhnya Rusia memang telah menyatakan perspektif yang berbeda dibanding dengan pandangan Barat kebanyakan. Pada Perang Kosovo tahun 1999, Rusia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap intervensi NATO dengan melakukan serangkaian serangan udara di wilayah Yugoslavia (sekarang Serbia) tanpa melalui persetujuan DK PBB. Sayangnya, Rusia sebagai negara *infant* saat itu masih belum cukup kuat untuk menentang negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dunia saat itu. Kejayaan Barat (AS melalui NATO dan Uni Eropa) pada akhirnya menghentikan konflik di Yugoslavia dengan berujung pada dominasi mereka di wilayah Balkan melalui resolusi 1244 PBB dan KFOR. Bagaimanapun,

---

<sup>36</sup> Trennin, Dmitri. *Russia's Spheres of Interest, not Influence*. (Center for Strategic and International : The Washington Quarterly , 2009) Hlm. 4

kemerdekaan Kosovo atas Serbia menyulut skeptisisme Rusia terhadap terancannya cita-cita Rusia menuju dunia yang multipolar. Kemunculan NATO menjaring wilayah Balkan adalah sebagai usaha untuk mengurangi pengaruh Rusia, termasuk pada sisa-sisa kejayaannya (baca: komunisme Uni Soviet). Dominasi Amerika Serikat melalui NATO pada akhirnya diartikan sama dengan perluasan pengaruh AS di wilayah Balkan, yang juga seiring dengan perluasan NATO di wilayah Balkan dan semakin mendekati *Near Abroad*.

Sejak awal Uni Eropa dan NATO memang telah berusaha menanamkan pengaruh mereka di wilayah Balkan. Jerman adalah salah satu negara yang mewakili kepentingan Uni Eropa di wilayah Balkan. Jika Kosovo dinyatakan berdaulat, maka tiba saatnya bagi Organisasi Keamanan Uni Eropa (OSCE) untuk menanamkan pengaruhnya di sana.<sup>37</sup> Kerja Keras UE dan NATO untuk menduduki Kosovo adalah dengan perhitungan bahwa Kosovo, sama dengan Serbia, secara geografis terletak di pusat wilayah Balkan, sehingga kebijakan apapun yang diterapkan di sana, besar kecilnya akan mempengaruhi negara-negara yang ada disekitarnya. Lebih jauh, Rencana Serbia bergabung kedalam Uni Eropa adalah sebuah peringatan besar bagi Rusia, melihat kepentingan Rusia di Serbia sangat besar secara geopolitis.

Kemerdekaan Kosovo akan menjadi tolak ukur kejayaan NATO dan UE di wilayah Balkan. Jika Kosovo merdeka, maka dominasi Rusia akan surut. Kejadian-kejadian yang terjadi pada akhir abad ke-20 akan terulang kembali: Rusia kembali dikesampingkan. Rusia mau tidak mau harus membentuk kubunya

---

<sup>37</sup> Kue Bernama Kosovo Buat Jerman. Diakses melalui <http://www.dw.de/kue-bernama-kosovo-buat-jerman/a-2956798>, pada 27 April 2015, 14.51 WIB

sendiri dan menunjukkan eksistensinya termasuk di wilayah CIS sebagai kekuatan yang menumpas unipolaritas.

### 3. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sulit untuk lepas dalam menjelaskan perilaku Internasional. Saat kita berbicara mengenai kepentingan nasional, maka akan selalu mengarah kepada tujuan sebuah negara dan rejimnya berdasarkan pada representasi dari bangsanya. Biasanya di pengaruhi oleh pengalaman sejarah.<sup>38</sup> Menurut Morgenthau<sup>39</sup>, konsep kepentingan nasional adalah mengenai kelangsungan hidup, di mana kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturenya dari gangguan negara lain, juga untuk melindungi integritas teritorial serta ekonomi-politiknya. Selain itu, Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan manifestasi dari kemajuan atas posesi terhadap kekuatan.<sup>40</sup> Lebih dalam, Beard menjelaskan konsepsi tersebut dengan mengemukakan :

*“The conception of national interest revealed in the state papers is an aggregation particularities assembled like eggs in a basket. Markets for Agricultural produce in the national interest; markets for industrial commodities were national interest; naval bases, territorial acquisitions for commercial support, an enlarged consular and diplomatic service, and increased navy and merchant marine, and occasional wars were all in the national interest”<sup>41</sup>*

---

<sup>38</sup> Rourke, T. John. *International Politics On The World Stage*. (California: Wadsworth. Inc, 1986)

<sup>39</sup> Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1998) Hlm. 141

<sup>40</sup> Fred Sondermann (dkk). *Theory And Practice Of International Relations*. (USA:Prentice Hall, Inc, 1979) Hlm. 88

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm 90

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur oleh para pengambil keputusan di masing-masing negara sebelum merumuskan maupun menetapkan sikap dan tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan sebuah negara-bangsa.<sup>42</sup>

Papp dalam buku *Contemporary International Relations* menyatakan bahwa dalam hubungan internasional modern, konsep kepentingan nasional masih bersifat ambigu untuk dijelaskan. Meskipun demikian, Papp menjelaskan beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan dalam mendefinisikan apa itu kepentingan nasional:

Pertama, kepentingan nasional bisa dijelaskan melalui kriteria ekonomi suatu negara. Segala kebijakan apapun yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dapat dikategorikan sebagai kepentingan nasional. Meningkatkan kekuatan perekonomian dan kesejahteraan negara dengan berlandaskan pada perdagangan dan industri. Dalam konteks di wilayah Rusia, Perubahan yang paling kentara dirasakan di Rusia dewasa ini adalah pada sektor ekonomi. Kedua, kriteria ideologi kadang-kadang bisa disebut sebagai determinan yang paling dominan atas kepentingan nasional sebuah negara. Kebanyakan negara menggunakan ideologi sebagai instrumen untuk menilai antara legitimasi dan kebijakan mereka. Ketiga, kekuatan suatu negara (dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai 2 faktor sebelumnya). Keempat, meskipun tidak banyak menentukan, kekuatan militer mengambil peranan cukup penting di

---

<sup>42</sup> T.May Rudy, Aditama, Refika. *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, (Bandung: 2002) Hlm. 116

dalam hubungan internasional yang bisa dijadikan instrumen untuk menjelaskan kepentingan suatu negara. Kelima, adalah moralitas dan legalitas.<sup>43</sup>

Rusia memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduknya yang multietnis. Dengan demikian, masalah konflik etnis dan disintegrasi adalah masalah yang selalu identik dalam perpolitikan di Rusia terutama saat awal dibentuknya federasi.

Rusia juga dapat dikatakan sebagai produk kegagalan unifikasi di masa lalu. Sehingga kehilangan sedikit saja wilayahnya akan menjadi sebuah problema yang besar di dalam tubuh Rusia itu sendiri. Chechnya merupakan salah satu contoh yang paling nyata atas usaha-usaha kelompok minoritas dalam memisahkan diri dari Rusia. Meskipun tidak identik dengan usaha-usaha separatisme yang ada di dalam tubuh Rusia, kemerdekaan di Kosovo setidaknya akan menjadi pemicu bagi pergerakan-pergerakan lainnya yang ada di dalam tubuh Rusia maupun di seluruh Dunia. Jika benar terjadi, perpecahan di dalam tubuh Rusia tentu akan berdampak besar terhadap ekonomi di Rusia. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Rusia, tentu saja selain menjadi penyangga geografis atas invasi asing.

Uraian di atas dapat kemudian dijadikan sebagai sebuah jembatan penghubung atas pertanyaan seputar Rusia dan kepentingannya. Melihat bahwa Rusia merupakan negara dengan wilayah yang luas serta berkeinginan untuk maju dan sejahtera secara internal maupun eksternal, tentu menjadi lumrah bila

---

<sup>43</sup> *Op., Cit.* Papp., Hlm. 30-31

kebutuhan atas kemajuan ekonomi, militer, dan politik akan berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang dimanifestasikan dan diejawantahkan.

### **E. Hipotesa**

Sesuai dengan penjabaran pokok permasalahan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan Rusia dalam menolak Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Kosovo atas Serbia tahun 2008 karena: (1) Rusia berusaha menjaga hubungan baik dengan Serbia sebagai kunci pengaruh Rusia di wilayah Balkan dan Eropa (2) Rusia menuju dunia yang multipolar: membendung pengaruh NATO dan Uni Eropa di wilayah Balkan, serta meningkatkan eksistensinya di *Near Abroad* / CIS (3) Rusia menghindari kebangkitan gerakan-gerakan separatisme di dalam tubuh Rusia.

### **F. Metodologi penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada serangkaian teori yang telah dipaparkan pada sub bab landasan teori. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif, dengan tujuan untuk menjelaskan serangkaian peristiwa maupun hubungan antara beberapa gejala peristiwa dan variable-variabelnya.

Pendekatan eksplanatif yang digunakan dalam penelitian ini akan menjelaskan pertanyaan rumusan masalah “Mengapa Rusia menolak Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Kosovo Tahun 2008?” dan untuk membuktikan apakah hipotesa yang digunakan dapat diuji berdasarkan fakta dan teori yang ada.



Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, berita, artikel, penelitian yang relevan, surat kabar, majalah, dan internet, yang kemudian dibaca, dibandingkan dan dianalisa.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada sikap Rusia dalam mendukung Serbia untuk menolak kemerdekaan Kosovo pasca deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008 dan tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia bersama dengan Serbia pasca masa tersebut dalam membendung adanya dukungan dari negara-negara lain di seluruh dunia. Selain itu, penelitian ini juga mengambil jangka waktu sejak tahun 1999 yaitu saat tingginya gerakan pemberontakan tentara Albania dan KLA atas usahanya dalam melepaskan diri dari wilayah Serbia, yang didukung oleh pihak asing seperti Amerika dan NATO

### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing per-babnya akan menjelaskan substansi yang berbeda-beda namun tetap memiliki hubungan yang sistematis dalam menjelaskan masalah yang diteliti. Berikut akan dijelaskan garis besar dari isi penulisan ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan konsep sebagai acuan penelitian, hipotesa penulis, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : POLITIK RUSIA TERHADAP SEPARATISME**

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang sejarah, geografi, politik, dan ekonomi Rusia. Kemudian bab ini menjelaskan politik Rusia dalam mengaspirasikan perspektifnya terhadap separatisme.

## **BAB III : PENOLAKAN RUSIA TERHADAP KEMERDEKAAN KOSOVO**

Secara umum menjelaskan mengenai respon Rusia terhadap kemerdekaan Kosovo. Diawali dengan menjelaskan Sejarah wilayah Kosovo, selanjutnya bab ini akan membahas lebih detail mengenai krisis yang terjadi di Kosovo pasca berkembangnya pergerakan-pergerakan nasionalis Kosovo yang berujung pada ketegangan Internasional antara Rusia dan Barat, baik pra maupun pasca kemerdekaan.

## **BAB IV : KEPENTINGAN RUSIA MENOLAK DEKLARASI KEMERDEKAAN KOSOVO TAHUN 2008**

Bab ini merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian, menjelaskan mengenai alasan-alasan politik yang menyebabkan Rusia menolak deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan. Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis atas uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.